



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : E. ABD. RAHMAN
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 63693

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.115.000.000**

1. Tanah Seluas 127 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 128 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 86 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 88 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 741 m2/250 m2 di SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
7. Tanah Seluas 800 m2 di LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 83.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	42.431.121
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.271.431.121
III. HUTANG	Rp.	71.040.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.200.391.121

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.